

Strategi Komunikasi Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendukung Mengurangi Konflik Pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Communication Strategies for Using Information Technology to Support the Reduction of Land Conflicts in Kutai Kartanegara Regency

Dian Erdiansyah^{1*}, Denik Iswardani Witarti²

^{1,2} Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif
Universitas Budi Luhur

E-mail: ¹2471600169@student.budiluhur.ac.id, ²denik.iswardani@budiluhur.ac.id
(* corresponding author)

Abstract

Based on data obtained from the Land and Spatial Planning Agency of Kutai Kartanegara Regency, there have been 131 land conflicts from 2009 to 2024. The problem arises from the chaotic nature of land ownership data, resulting in many cases of community land being taken over by companies with land use rights. One of the efforts of the Kutai Kartanegara Regency Government to help reduce land conflicts is to utilize information technology, which is implemented by village officials to organize the chaotic land ownership data. The purpose of this study is to examine the application of communication strategies using information technology to support the reduction of land conflicts by regulating land rights in Kutai Kartanegara Regency. This study uses a qualitative case study approach. Data collection was conducted through in-depth interviews with several informants, namely consultants and staff from the Kutai Kartanegara Regency Land and Spatial Planning Agency who handle land conflicts. The results of the study show that communication strategies in the use of information technology can contribute to reducing land conflicts by increasing the amount of community land registered by village officials through its implementation.

Keywords: communication strategy, innovation diffusion theory, land conflict

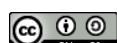
Abstrak

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terjadi 131 konflik pertanahan yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2024. Permasalahan yang terjadi dikarena semrawutnya data penguasaan tanah sehingga banyak penguasaan tanah masyarakat oleh perusahaan pemilik Hak Guna Usaha terhadap tanah masyarakat. Salah satu usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung menurunkan konflik pertanahan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang dilaksanakan oleh petugas desa untuk membenahi data penguasaan tanah yang semrawut. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat penerapan strategi komunikasi dengan teknologi informasi untuk mendukung menurunkan konflik pertanahan, dengan menertibkan hak tanah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif jenis studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan interview mendalam dengan beberapa informan yaitu beberapa pihak konsultan dan staff Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara yang menangani konflik pertanahan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa strategi komunikasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dapat berkontribusi dalam menurunkan konflik pertanahan dengan bertambahnya tanah masyarakat yang terdaftar oleh petugas desa dengan menerapkannya.

Kata kunci: konflik pertanahan, strategi komunikasi, teori difusi inovasi

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan tekanan terhadap lahan, dan hal ini



menjadi faktor utama pemicu sengketa pertanahan. Pembangunan yang pesat dan dinamis di suatu daerah dapat mengakibatkan perubahan tata guna lahan. Proyek-proyek infrastruktur atau perumahan seringkali memicu konflik terkait kepemilikan dan penggunaan tanah, terutama jika terdapat ketidakjelasan legalitas atau klaim yang saling bersaing. Sengketa pertanahan seringkali muncul sebagai dampak dari kebijakan atau keputusan pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keputusan terkait peruntukan tanah, pengalihan status tanah, atau pemberian izin usaha dapat menjadi sumber perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

Konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara telah terjadi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2024 dengan jumlah kejadian sebanyak 131 kasus. Konflik ini dapat berupa konflik antar warga dengan perusahaan. Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) diberi tugas dalam membenahi konflik pertanahan yang sering terjadi. Beberapa usaha yang telah dilakukan oleh DPPR diantaranya, pada tahun 2024 lalu telah melakukan pendataan terhadap kasus konflik pertanahan, dan pada tahun 2025 ini melakukan pendataan Surat Keterangan Perdaftaran Tanah (SKPT), melakukan pemodelan untuk memprediksi konflik pertanahan dan mencari faktor-faktor penyebabnya, membuat sistem untuk mendukung pendataan SKPT dan sistem pengaduan sengketa pertanahan. Dan diharapkan pada tahun 2026 nanti dan tahun selanjutnya, sistem-sistem ini dapat membantu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menurunkan konflik pertanahan, dengan semakin tertibnya SKPT. Penertiban SKPT akan terkait dengan tanah masyarakat yang belum ada sertifikatnya. Dalam rangka pengurangan konflik tanah, tentunya semua jenis hak tanah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara harus ditertibkan termasuk Hak Guna Usaha (HGU) yang banyak diusahakan perusahaan atau investor. Termasuk tanah yang merupakan aset pemerintah, karena ada sengketa yang terjadi dikarenakan sekolah yang merupakan aset pemerintah daerah masih menggunakan tanah warga.

Permasalahan yang muncul yaitu konflik tanah, dikarenakan belum adanya ketegasan batas tanah warga, tanah perusahaan dan pemerintah sebagai mediator, tidak mengkomunikasikan berbagai pihak. Dan banyak konflik terjadi secara tiba-tiba, padahal pemberian status tanah antar warga dan perusahaan, sudah terjadi sebelumnya dan hal seperti ini tidak ada kesepakatannya, atau sering terjadi secara sepihak. Konflik pertanahan, penelitian pada konflik pertanahan yang terjadi antara masyarakat pertanian di Desa Lubuk Mandarsah dengan sebuah perusahaan kayu yaitu PT Wira Karya Sakti, dipicu oleh adanya rasa kepemilikan. Kedua kelompok tersebut berupaya memperkuat kelompok mereka untuk mempertahankan hak atas tanah. Penyelesaian cara mediasi berisikan keputusan mengenai pengembalian tanah oleh pihak perusahaan dan secara penuh tanah itu merupakan milik masyarakat [1].

DPPR dalam rangka menyiapkan solusi untuk meredakan konflik yang berlarut-larut sejak tahun 2019 dan masih sering terjadi sampai tahun 2024 kemarin, menggunakan bantuan teknologi informasi dan pendataan. Untuk melengkapi solusinya, akan menerapkan strategi komunikasi yang didukung solusi dengan teknologi dan pendataan dan diharapkan solusi pertama dengan adanya solusi tambahan strategi komunikasi akan makin meminimalkan konflik sengketa tanah karena mengupayakan solusi dari aspek pendekatan sosial untuk menjelaskan pertanahan, menerima hasil teknologi dan pendataan dan aturan pertanahan yang berlaku.

Strategi komunikasi merupakan kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator dalam hal ini Kepala Seksi yang menangani konflik pertanahan dari DPPR, pesan, media yang digunakan, penerima dalam hal ini semua petugas desa, dan efek yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal [2]. Strategi komunikasi juga merupakan perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan yaitu agar semua petugas desa dapat melakukan pendaftaran tanah masyarakat. Tahapan dalam strategi komunikasi terdiri dari perencanaan strategi untuk mencapai tujuan, implementasi dan evaluasi strategi untuk mengukur dalam penetapan tujuan yaitu terdaftarnya semua tanah masyarakat [2].

Teori difusi inovasi (*Diffusion of Innovative*) dari Rogers dan Shoemaker (1971), menjelaskan bagaimana, mengapa, dan pada tingkat berapa ide dan teknologi baru menyebar melalui suatu populasi. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi suatu inovasi mengikuti pola yang dapat diprediksi, bergerak melalui berbagai kategori pengadopsi dari waktu ke waktu. Teori ini, yang dipopulerkan oleh Everett Rogers, relevan dengan berbagai bidang, termasuk pemasaran, kesehatan masyarakat, dan

adopsi teknologi. Teori difusi inovasi Everett Rogers menjelaskan bagaimana, melalui saluran komunikasi tertentu, suatu inovasi menyebar dalam suatu sistem sosial (kelompok atau organisasi) dari waktu ke waktu [3]. Inovasi sistem informasi adalah inovasi dalam bidang teknologi komunikasi dan digital serta aplikasinya [4].

Penelitian sebelumnya terkait konflik pertanahan, penelitian pada konflik pertanahan yang terjadi antara masyarakat pertanian di Desa Lubuk Mandarsah dengan sebuah perusahaan kayu yaitu PT Wira Karya Sakti, dipicu oleh adanya rasa kepemilikan. Kedua kelompok tersebut berupaya memperkuat kelompok mereka untuk mempertahankan hak atas tanah. Penyelesaian cara mediasi berisikan keputusan mengenai pengembalian tanah oleh pihak perusahaan dan secara penuh tanah itu merupakan milik masyarakat [1]. Sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya yang menerapkan difusi inovasi adalah kegiatan difusi inovasi memanfaatkan teknologi digital berupa Sistem Administrasi Desa Wanagiri dan website untuk pelayanan administrasi pemerintahan desa di Desa Wanagiri, Kecamatan Saketi [5], peningkatan kinerja UMKM [6], meningkatkan partisipasi dan kepercayaan warga terhadap proses pemilu di wilayah kerja Dubai [7], pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Dolopo [8], edukasi dan sosialisasi pemanfaatan pengelolaan sampah organik dengan konsep *eco enzym* di RW 10 Meruya Utara [9], meningkatkan perekonomian keluarga di Kelurahan Paninggilan Ciledug [10], pemanfaatan fitur wirausaha online pada tokopedia.com untuk peningkatan penghasilan rumah tangga [11], memperkuat peran pelayanan kesehatan Puskesmas Purbaratu [12]. Difusi inovasi juga telah dilakukan oleh TaniHub memungkinkan petani menjual hasil panen secara langsung ke konsumen [13]. O'Kimbab, sebuah usaha kuliner kreatif yang mengadopsi nilai-nilai gaya hidup sehat dan budaya Korea dalam bentuk makanan praktis berbasis kimbab [14].

Alasan penulis memilih penelitian untuk kasus ini, dikarenakan banyaknya konflik pertanahan yang terjadi akibat belum tertibnya pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, seperti: banyaknya persinggungan batas HGU dengan tanah masyarakat. Karena hal ini pihak perusahaan perkebunan sawit kemudian menguasai tanah masyarakat dan masyarakat merasa dirugikan sehingga terjadi konflik. Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dapat dicegah dengan menertibkan tanah masyarakat sehingga pihak perusahaan tidak dapat menguasai tanah yang statusnya sudah jelas. Pihak dinas untuk mendorong petugas desa menertibkan tanah masyarakat memerlukan strategi komunikasi sehingga petugas desa dapat bersama-sama menggunakan Teknologi Informasi. Hal ini menguntungkan pihak dinas dalam mengawasi penguasaan tanah masyarakat oleh perusahaan sawit.

Selain itu penulis ingin menerapkan strategi komunikasi yang berhasil mengatasi permasalahan komunikasi diantara masyarakat dan pemerintah daerah. Keberhasilan penerapan strategi ini, seperti terlihat pada kegiatan difusi inovasi memanfaatkan teknologi digital berupa Sistem Administrasi Desa Wanagiri dan website untuk pelayanan administrasi pemerintahan desa di Desa Wanagiri, Kecamatan Saketi [5], membantu meningkatkan perekonomian keluarga di Kelurahan Paninggilan Ciledug [10], memperkuat peran pelayanan kesehatan Puskesmas Purbaratu [12].

Penelitian ini mempunyai kebaruan pada penerapan strategi komunikasi dalam pemanfaatan Teknologi Informasi sehingga dengan komunikasi yang efektif antara dinas dengan petugas desa, teknologi dapat diterapkan membantu mempercepat penerbitan hak-hak atas tanah.

Pertanyaan penelitian ini adalah: 1). Apakah strategi komunikasi dalam penerapan teknologi informasi dapat berkontribusi menurunkan konflik pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara? 2). Apakah teknologi informasi yang dirancang bisa mengatasi kesemrawutan data penguasaan tanah sebagai penyebab konflik pertanahan? 3). Bagaimana penerimaan pemangku kepentingan terhadap teknologi informasi tersebut? 4). Apakah penerapan strategi komunikasi dengan penerapan teknologi informasi berhasil berkontribusi dalam menurunkan konflik pertanahan? Pertanyaan penelitian ini dijadikan acuan untuk melakukan penelitian bagaimana menerapkan strategi komunikasi dapat diterapkan menciptakan komunikasi yang efektif sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan konflik pertanahan yang sering terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari formula dari strategi komunikasi dengan menerapkan teknologi informasi yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan. Strategi komunikasi efektif dalam penerapan teknologi informasi oleh semua pemangku kepentingan sampai tingkat desa akan mempercepat menertibkan data penguasaan tanah, sehingga dapat

berkontribusi dalam menurunkan konflik pertanahan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif jenis studi kasus untuk meneliti proses difusi inovasi yang dilakukan DPPR Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian jenis studi kasus akan fokus pada kasus yaitu keadaan serta penyebab terjadinya kasus [15]. Penelitian studi kasus dilakukan mengeksplorasi mendalam pada lingkup terbatas, pengumpulan data yang mudah Diakses [15]. Penelitian studi kasus dipilih karena penulis terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pengentasan konflik di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan banyak berinteraksi dengan pihak dinas dan pihak konsultan yang terlibat. Sehingga penulis dapat menggali informasi dari banyak informan dan mendapatkan informasi dari sumber lainnya. Diharapkan formulasi yang didapat dapat diterapkan juga di tempat lain, dengan penelitian ini penulis ingin lebih mengetahui keadaan di lapangan dan solusi yang dapat diberikan dengan strategi komunikasi.

Tahapan penelitian dimulai dari mengidentifikasi permasalahan, studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan mengambil kesimpulan dari penelitian berdasarkan temuan. Adapun kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil penerapan strategi komunikasi yang sudah dilaksanakan.

Sumber data atau informan dalam penelitian ini tiga konsultan pendataan tahun 2025, dua konsultan kajian pertanahan pada tahun 2024, dan beberapa staf dari bagian bidang di DPPR yang menangani konflik pertanahan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara interview mendalam dengan para informan. Uji validasi terhadap data menggunakan teknik triangulasi data dengan staf lainnya yang tidak terlibat dalam kegiatan yang berguna untuk mendapatkan sudut pandang tambahan [16]. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap indikator dari gaya komunikasi kepemimpinan. Tahapan analisis data, yaitu: mulai dari pengumpulan data, kondensasi data, mereduksi data, menyajikan data dan terakhir mengambil kesimpulan. Miles dan Huberman menyebutkan bahwa analisis data adalah tahapan yang dijalankan secara interaktif dan akan berjalan secara terus menerus sampai tuntas dimana keadaan data sudah jenuh [17]. Analisis data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid yang selanjutnya akan digunakan dalam tahap strategi komunikasi. Teknologi digunakan untuk mengelola dan memproses data pertanahan sehingga menjadi rapih, tertib dan sesuai di lapangan. Penurunan konflik dapat dihindari dengan melihat data yang representasi dari lapangan yang menunjukkan status tanahnya belum jelas. Kondisi seperti ini yang berpotensi terjadinya konflik sehingga data hak atas tanah harus ditegaskan melalui pendataan baru dan perapian data atributnya. Data atribut yang dimaksud seperti pemilik, luas tanah, asal usul tanah dan seterusnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi komunikasi dengan menerapkan difusi inovasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, dalam perencanaan ditentukan target yang akan akan dicapai yaitu dimulai dari penyiapan Teknologi Informasi, rencana pelaksanaan bimbingan teknis, pendaftaran tanah masyarakat oleh petugas desa, dan menurunkan konflik pertanahan.

3.1 Konflik Pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan data dari informan, awal mula terjadinya konflik adalah pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengundang investor dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Pemerintah membuka pintu bagi investor kelapa sawit sehingga berjalan program penerbitan HGU besar-besaran di Kabupaten Kutai Kartanegara. Akan tetapi, penerbitan hak HGU ini tidak dibarengi dengan kesiapan daerah dengan kondisi administrasi pertanahan yang tertib. Sebagai akibatnya, banyak tanah masyarakat yang belum bersertifikat tumpang tindih dengan HGU, atau banyak terdapat tanah tidak bertuan sebagai akibat pemetaan yang salah yang dikemudian hari diakui secara sepahak oleh pihak-pihak tertentu, dapat berupa masyarakat atau perusahaan.

Peran teknologi informasi adalah untuk merapikan kembali hak-hak atas yang disepakati semua pihak. Untuk mencapai kearah tersebut, teknologi informasi akan digunakan untuk membantu mempercepat mendata tanah. Aktivitas ini akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan

memperdayaan petugas yang ada di kantor desa. Yang sudah berjalan, pihak dinas melakukan pengumpulan data yang ada dan harus diolah dengan bantuan alat teknologi informasi. Data yang diintegrasikan dengan alat teknologi informasi ini akan disebarluaskan kembali ke masing-masing desa, untuk melengkapi data pertanahan.

3.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi yang diterapkan oleh DPPR Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan digunakan untuk membantu menurunkan konflik pertanahan terdiri dari: (1) pendataan konflik pertanahan, (2) sistem prediksi konflik pertanahan, (3) database pertanahan, (4) sistem pengaduan berbasis mobile, dan (5) pendataan SKPT dan hak atas tanah lainnya. Sistem dirancang untuk saling mendukung dalam menurunkan konflik pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Teknologi informasi yang dibangun, masyarakat sebagai pemohon dapat mengajukan SKPT melalui petugas desa. Petugas desa akan menginput permohonan kemudian dikirim ke petugas kecamatan untuk divalidasi. Setelah divalidasi oleh petugas kecamatan, diteruskan ke dinas sehingga masuk ke database dinas. Data ini sebagai bahan monitoring untuk mengurangi konflik pertanahan.

Berdasarkan informasi dinas, selama ini yang melakukan pendataan SKPT dilakukan di tingkat desa dan itu pun terjadi karena masyarakat ada kebutuhan misalnya akan melakukan jual beli tanah. Sehingga di masing-masing desa, daftar SKPT yang terdaftar tidak seluruh tanah yang ada di desa. Data ini tidak disampaikan ke kantor kecamatan, sehingga jika terjadi konflik pertanahan pihak dinas kesulitan mengumpulkan data tanah yang sedang konflik. Lebih parahnya lagi, sering terjadi untuk data SKPT untuk yang sedang konflik ini belum terdaftar di desa, sehingga jika sedang terjadi konflik pihak dinas akan kesulitan dalam mengambil keputusan. Untuk berkontribusi dalam mencegah konflik pertanahan yaitu dalam menertibkan data pertanahan, sistem ini dibuat dan dari awal pihak dinas dapat mengantisipasi konflik dengan memonitor data SKPT yang ada di desa-desa. Sistem ini akan diterapkan di seluruh pemangku kepentingan sampai desa dan dengan harapan dapat membantu mempercepat menertibkan penguasaan tanah. Sehingga diperlukan strategi komunikasi agar sistem ini dapat digunakan dan dengan semakin cepat penertiban penguasaan tanah dapat berkontribusi menurunkan konflik pertanahan.

Teknologi Informasi yang dibangun, masyarakat sebagai pemohon dapat mengajukan SKPT melalui petugas desa. Petugas desa akan menginput permohonan kemudian dikirim ke petugas kecamatan untuk divalidasi. Setelah divalidasi oleh petugas kecamatan, diteruskan ke dinas sehingga masuk ke database dinas. Data ini sebagai bahan monitoring untuk mengurangi konflik pertanahan.

Berdasarkan informasi dinas, selama ini yang melakukan pendataan SKPT dilakukan di tingkat desa dan itu pun terjadi karena masyarakat ada kebutuhan misalnya akan melakukan jual beli tanah. Sehingga di masing-masing desa, daftar SKPT yang terdaftar tidak seluruh tanah yang ada di desa. Data ini tidak disampaikan ke kantor kecamatan, sehingga jika terjadi konflik pertanahan pihak dinas kesulitan mengumpulkan data tanah yang sedang konflik. Lebih parahnya lagi, sering terjadi untuk data SKPT untuk yang sedang konflik ini belum terdaftar di desa, sehingga jika sedang terjadi konflik pihak dinas akan kesulitan dalam mengambil keputusan. Untuk mencegah konflik pertanahan maka sistem ini dibuat dan dari awal pihak dinas dapat mengantisipasi konflik dengan memonitor data SKPT yang ada di desa-desa.

3.3 Berkontribusi Menurunkan Konflik Pertanahan

Berdasarkan informasi dari DPPR bahwa Teknologi Informasi yang dibangun oleh DPPR Kabupaten Kutai Kartanegara bersama pihak konsultan bertujuan untuk menurunkan konflik pertanahan melalui penertiban administrasi pertanahan di desa-desa dan akan melibatkan petugas di 193 desa di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara. Teknologi Informasi ini sudah mulai diperkenalkan dan disosialisasikan kepada petugas desa dan petugas di kecamatan ketika staf DPPR mulai melakukan pengumpulan data SKPT. Pengadaan Teknologi Informasi ini merupakan kegiatan lanjutan dari DPPR dan merupakan hal baru bagi petugas desa dan petugas kecamatan yang selama ini masih dilakukan secara konvensional dan menunggu masyarakat yang mengajukan SKPT karena berkepentingan. Menurut informan, untuk menyebarkan inovasi baru ini perlu dilakukan bimbingan teknis yang akan dilakukan DPPR serta dukungan pihak konsultan yang mengadakan alat Teknologi Informasi ini. Dengan harapan, bimbingan teknis yang dilakukan dapat memberi keterampilan bagi

petugas desa dalam menggunakannya dalam waktu cepat. Karena dengan cepat dapat mengimplementasi alat ini akan semakin cepat mengurangi konflik pertanahan. Sehingga di masa yang akan datang petugas desa dan petugas kecamatan dalam kerja harianya akan menggunakannya. Hal ini dapat menjadi alat yang tepat untuk membantu mengatasi konflik pertanahan secara tidak langsung, dengan menyiapkan data penggunaan tanah yang baik. Informasi ini berdasarkan diskusi dengan informan dari dinas yang sudah lama menangani konflik pertanahan. Penyebaran inovasi melalui bimbingan teknis akan dijelaskan fungsi-fungsi dari inovasi baru ini dan menggantikan cara konvensional. Kegiatan bimbingan teknis, dibutuhkan peran aktif dari petugas desa agar mampu menggunakan alat ini, jika ingin bertanya lebih maka pihak DPPR memberikan layanan support melalui email. Petugas desa yang sudah dapat mahir menggunakan alat teknologi informasi ini sehingga dapat membantu mendata penguasaan tanah. Dalam acara rutin yang akan dilakukan DPPR melalui kecamatan, petugas desa yang sudah mencoba-coba tapi belum sepenuhnya paham dapat menghadiri acara di kecamatan tersebut. Kegiatan ini akan dilakukan oleh DPPR sampai petugas desa mampu menggunakan untuk melakukan pendaftaran tanah masyarakat.

Kegiatan penertiban penguasaan tanah melalui bimbingan teknis yang dilakukan, menerapkan elemen-elemen utama dari Teori Difusi Inovasi, termasuk tahapan dalam penerapan adopsi inovasi. Tahap-tahap yang dilakukan untuk memberdayakan petugas desa tersebut, dengan komunikasi yang efektif dapat berkontribusi dalam menurunkan konflik pertanahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan terdatanya SKPT milik masyarakat dapat menghindari penguasaan tanah masyarakat oleh perusahaan terutama untuk tanah yang berada atau bertampalan dengan HGU perkebunan perusahaan. Strategi komunikasi dengan menerapkan difusi inovasi seperti diuraikan di atas, adanya peran komunikator yaitu DPPR, pesan yang dirancang, media yang digunakan, target audiens dan efek diadakannya kegiatan ini. Strategi komunikasi yang diterapkan, mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi, sampai tercapainya target dalam penertiban penguasaan tanah, dan ikut berkontribusi dalam menurunkan konflik pertanahan. Keberhasilan penerapan difusi inovasi dapat dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya, kegiatan difusi inovasi dalam memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan pelayanan administrasi pemerintah desa dalam melayani masyarakat dengan adanya sosialisasi dan pendampingan [5], meningkatkan kinerja UMKM [6], meningkatkan kepercayaan warga dan meningkatkan partisipasi warga pada proses pemilu [7], meningkatkan kinerja pada BUM Desa [8], dan memperkuat peran pelayanan kesehatan [12].

3.4 Perencanaan Strategi Komunikasi

Perencanaan strategi komunikasi dimulai dengan menyiapkan team komunikator untuk kegiatan bimbingan teknis, pesan yang akan disampaikan, media yang digunakan, audiens yaitu pengguna teknologi informasi yaitu petugas desa, dan efek yang dihasilkan. Petugas desa yang dapat menerapkan teknologi informasi ikut berkontribusi dalam menurunkan konflik pertanahan melalui perannya melakukan pendataan penguasaan tanah termasuk SKPT. Pada tahap awal menurut informan pihak konsultan Bapak Kus Kadarusman yang sudah terlibat sejak 2024, sudah dilakukan kajian terhadap data-data konflik pertanahan pada tahun 2024 yang lalu. Hal ini untuk memprioritaskan desa mana yang akan melakukan bimbingan teknis setelah alat Teknologi Informasi siap disebarluaskan dan digunakan. Dipilih tiga kecamatan untuk awal, menurut informan hal ini dilakukan karena keterbatasan Sumber daya yang ada. Pada tahap perencanaan juga dilakukan *training for trainer* agar orang yang akan melakukan bimbingan teknis di desa-desa dapat menyampaikan informasi dengan seutuhnya tentang manfaat dari Teknologi Informasi yang akan digunakan oleh petugas desa. Komunikator harus mampu menjelaskan nantinya, manfaat alat Teknologi Informasi dan paham cara mengoperasikannya, masukan dari pihak konsultan kepada DPPR.

Pesan yang disiapkan nantinya harus dapat menyediakan segala tentang informasi dari Teknologi Informasi yang selesai dibuat dan mendorong petugas desa berusaha memahaminya dan terampil menggunakan supaya dapat melakukan kerja rutin melakukan pendaftaran tanah masyarakat. Pesan dapat disampaikan melalui bimbingan teknis berupa panduan penggunaan dan penjelasannya oleh komunikator dan adanya layanan support untuk bertanya setiap saat melalui email dinas.

Difusi inovasi merencanakan penggunaan media baik itu bimbingan teknis yang dilakukan di kantor kecamatan atau melalui layanan support online yang akan disediakan oleh Dinas dengan target petugas desa mahir dalam menggunakan alat Teknologi Informasi ini. Menentukan target pencapaian, dalam

tahap pertama kegiatan untuk tiga kecamatan terlebih dahulu, yaitu kecamatan yang paling banyak terjadi konflik pertanahan yang telah ditentukan oleh Dinas dan ditargetkan petugas desa setelah mengikuti bimbingan teknis, selambat-lambatnya tiga bulan sudah bisa memanfaatkan alat Teknologi Informasi untuk mendaftarkan tanah masyarakat. Setelah tiga bulan, petugas desa sudah mulai melakukan pendaftaran tanah masyarakat. Sehingga data tanah masyarakat dalam SKPT sudah masuk ke database dinas buat bahan monitoring pencapaian pengumpulan SKPT. Efek kegiatan ini, petugas desa terbiasa menggunakannya dan harus dapat melakukan pendaftaran tanah masyarakat dalam bentuk SKPT akan selesai dalam satu atau dua tahun mendatang menurut informan

Persiapan dalam tahap perencanaan yang melibatkan komunikator, merancang pesan, memilih media yang akan dipakai, kesiapan petugas desa sebagai audiens dan efek berupa target pencapaian penurunan konflik pertanahan, selanjutnya pihak DPPR menjalankan strategi tahap implementasi. Tahap ini setelah semua produk Teknologi Informasi rampung dibangun.

Perencanaan strategi menjadi acuan untuk tahap implementasi strategi untuk mencapai target penurunan konflik pertanahan, dan telah menyiapkan prosedur dan jadwal untuk dilaksanakan yang ditargetkan dalam 2 tahun kedepan sesuai anggaran yang ada. Dalam perencanaan mempertimbangkan hal-hal baru atau mencoba mengakomodasi beberapa elemen yang sebelumnya tidak populer, sesuai pada penelitian [18]. Dalam perencanaan juga perlu dipertimbangkan memahami petugas desa yang akan diberi bimbingan teknik dan tujuannya tercapai, sesuai penelitian [19]. Strategi komunikasi persuasif perlu ditambahkan untuk mengajak petugas desa serius memahami apa yang akan disampaikan pada bimbingan teknik nanti, sesuai pada penelitian [20]. Pengalaman pada kegiatan sejenis ini akan menemukan kondisi petugas desa yang bersifat pasif dan cuek terhadap inovasi [2]. Idealnya perencanaan strategi dapat mengikuti konsep perencanaan komunikasi efektif yaitu melalui tahapan identifikasi target audiens, menetapkan tujuan komunikasi, mendesain proses komunikasi.

3.5 Implementasi Strategi Komunikasi

Tahap implementasi dalam strategi komunikasi yang dilakukan yaitu setelah memberi pembekalan *training for trainer*, selain bertugas menyampaikan informasi juga mampu berkomunikasi dengan petugas desa yang notabene masih ketinggalan dalam hal teknologi. Dari informan menyebutkan untuk yang akan bertugas adalah staf dari DPPR yang didampingi pihak konsultan. Peran DPPR terutama untuk menjalankan komunikasi untuk mendorong petugas desa, sedangkan pihak konsultan bertanggungjawab dalam *transfer knowledge*, menjadi pemberi dukungan teknis selama di lapangan yaitu di kantor kecamatan. Pesan yang disiapkan terdiri pesan yang sifatnya komunikasi kerja antara DPPR dengan perangkat desa untuk mengajak warga ikut terlibat, sedangkan pesan yang disiapkan pihak konsultan adalah bagaimana agar materi penggunaan teknologi informasi dapat dicerna dan dipahami petugas desa. Menurut informasi pihak DPPR untuk pendampingan teknis ini akan dilakukan selama 3 Hari.

Media penyampaian pesan oleh petugas DPPR adalah dialog langsung dengan petugas desa dan tokoh masyarakat. Sedangkan media penyampaian pesan informasi yaitu penggunaan teknologi informasi melalui bimbingan teknis dimulai dari penjelasan konsep, cara mengoperasikan, hubungan dengan tanggungjawab dalam struktur organisasi pemerintah desa dan praktik di lapangan. Penggunaan media juga dapat menggunakan konsep komunikasi pemasaran tersebut di *design* dengan mengikuti trend media sosial, seperti yang dilakukan penelitian [21].

Target kegiatan ini adalah petugas desa mampu menggunakan teknologi informasi untuk melayani masyarakat mendaftarkan SKPT yang merupakan bagian dari penguasaan tanah. Sedang pihak dinas menargetkan lewat tokoh masyarakat dapat menyampaikan kepada masyarakat. Efeknya, petugas desa dapat melakukan pendaftaran tanah masyarakat, minimal dalam bentuk SKPT. Tahap implementasi, seperti pada penyampaian pesan dengan budaya lokal dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pesan, pengaruh keterbatasan komunikator akan berdampak terhadap penerimaan pesan oleh *audiens* [22]. Implementasi strategi komunikasi dengan memahami regulasi yang ada sekaligus mendeskripsikan penggunaan strategi komunikasi pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengembangan pariwisata di wilayah lokal [23].

3.6 Evaluasi Strategi Komunikasi

Pada tahapan evaluasi strategi komunikasi, dilihat apakah hasil proses difusi inovasi sudah sesuai

dan seiring dalam mencapai tujuan dari pemanfaatan Teknologi Informasi untuk menurunkan konflik. Evaluasi strategi dilakukan terhadap aspek komunikator, pesan, media yang digunakan, audiens dan efek yang terjadi. Evaluasi strategi harus dilakukan terhadap semua komponen strategi komunikasi. Dari laporan kegiatan komunikator dapat dilihat apakah komunikator telah menjalankan tugas seperti yang ada pada perencanaan. Seorang komunitor harus mampu berkomunikasi dengan efektif dalam menggerakkan petugas desa untuk menggunakan inovasi baru, dan komunikator menyampaikan informasi tentang Teknologi Informasi yang akan digunakan petugas desa untuk melakukan pendaftaran tanah masyarakat. Tahap evaluasi pesan yang mampu mempengaruhi audiens agar petugas desa memanfaat teknologi informasi. Komunikasi yang berhasil mengenai pesan, dapat dilihat dari masukan dari petugas desa atau kecamatan terkait kegiatan bimbingan teknis dan selanjutnya mampu melakukan pendataan penguasaan tanah. Berdasarkan sumber, strategi penyampaian pesan memiliki berbagai hambatan dalam interaksi digital dan manusianya [24].

Pelaksanaan bimbingan teknis yang telah dilakukan di kantor kecamatan, apakah strategi penggunaan media pemberian pesan berjalan dengan baik. Pihak dinas menerima masukan selama bimtek seperti pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan di kantor desa, tetapi pihak dinas memberi penjelasan tentang anggaran yang ada. Selain kegiatan bimbingan teknis, pihak dinas juga menyelenggaran layanan support melalui email dan sedang direncanakan melalui layanan WAG. Bagi pihak dinas yang terpenting informasi dan cara menggunakan Teknologi Informasi dapat dilaksanakan oleh petugas desa. Penelitian sejenis tentang media, menyebutkan evaluasi dilakukan terhadap tantangan dalam penyampaian pesan adalah pemidahan tugas ke komunikator yang akan ke lapangan dan perbedaan pemahaman [25]. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Desa-PDTT terhadap Program Inovasi Desa, melakukan komunikasi langsung memilih dengan pemilihan media, komunikasi tidak langsung fokus pada strategi komunikasi bersifat struktural [26].

Audiens yaitu petugas desa setelah mendapatkan informasi dan bimbingan teknis dapat memberi kesan kesan telah mahir atau mahir menggunakan Teknologi Informasi, hal ini menjadi masukan bagi dinas untuk penganggaran dan kegiatan lanjutan. Menurut informan, yang terpenting petugas desa dapat mengadopsi Teknologi Informasi akan dilakukan sesuai kemampuan pihak dinas. Yang terpenting target menurunkan konflik pertanahan akan tercapai. Evaluasi dilakukan setelah sosialisasi, audiens tidak menggunakan Teknologi Informasi pemerintah Salatiga [27]. Evaluasi strategi yang dilakukan BKKBN tidak mampu mencapai tujuannya jika tidak melibatkan target sasaran [28]. Evaluasi dilakukan terhadap pengukuran respon audiens, pemahaman pembagian kerja komunikator yang kurang jelas, akibatkan terjadi ketidak sesuaian jadwal, media tidak sesuai perencanaan yang diterapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo [29]. Evaluasi strategi terhadap efek kegiatan ini dapat dilakukan oleh pihak dinas melalui alat Teknologi Informasi dalam fungsi monitoring. Pihak dinas dapat mengambil keputusan dari alat Teknologi Informasi yang sudah dibangun terkait masukan jumlah SKPT yang masuk, laporan pengaduan konflik pertanahan, dan hal ini menjadi bahan evaluasi terhadap strategi yang sedang dijalankan. Terhadap evaluasi strategi yang dilakukan DPPR Kabupaten Kutai Kartanegara, cara melakukan evaluasi strategi yang efektif buat pertimbangan pihak dinas, dilakukan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap [30]. Evaluasi dilakukan ketiga pada tahap implementasi terjadi hal-hal yang menghambat pelaksanaan bimbingan teknis, sesuai strategi yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta [31].

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, bahwa strategi komunikasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dapat berkontribusi menurunkan konflik pertanahan melalui penertiban data penguasaan tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penerapan Teori Difusi Inovasi membantu DPPR Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendorong petugas desa untuk membantu pendaftaran tanah masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi yang merupakan inovasi baru yang diadakan DPPR Kabupaten Kutai Kartanegara.

Strategi komunikasi yang dimulai dari perencanaan strategi telah disiapkan pihak DPPR Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencapai sasaran, implementasi strategi dilakukan pihak dinas sesuai rencana dan temuan di lapangan, serta evaluasi strategi dilakukan untuk mengkoreksi hasil implementasi sehingga tetap berjalan dalam mencapai sasaran dengan bertambahnya hasil pendaftaran tanah dan berefek terhadap menurunnya konflik pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

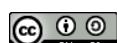
Kesimpulan terhadap hasil penelitian adalah: 1). strategi komunikasi dapat berjalan dengan baik antara dinas dengan pihak kecamatan saja dan pihak kecamatan antusias menjalankan di setiap desa atas komunikasi pihak dinas. Informasi hak tanah tersebut berhasil dikumpulkan dan peran teknologi informasi memudahkan mengkomunikasi sampai desa. 2). Pihak dinas berantusias terhadap hasil teknologi informasi yang akan dikomunikasi sampai ke desa bersama pihak kecamatan. 3). Pihak dinas menjadi lebih paham terhadap fungsi teknologi informasi untuk menertibkan pertanahan yang akan berkontribusi dalam menurunkan konflik pertanahan.

Hasil penelitian ini dapat direkomendasikan kepada kabupaten lain yang terdapat investasi perkebunan sawit atau sejenis, perlunya strategi komunikasi dengan menerapkan difusi inovasi untuk menurunkan bahkan menghindari konflik pertanahan masyarakat dengan perusahaan yang diakibatkan oleh tumpang tindih tanah masyarakat dengan HGU Perkebunan.

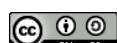
Penelitian ini hanya fokus menerapkan teori Difusi Inovasi terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi yang ada di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menerapkan teori komunikasi yang terkait dalam rangka menurunkan konflik pertanahan, juga dapat melibatkan peran Teknologi Informasi dari dinas lainnya, seperti Dinas Kehutanan dan Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum atau dinas lain yang terkait dengan pertanahan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Piter Pasaribu, G. Andekana, and R. H. Harahap, “Analisis Teori Lewis Coser Terhadap Konflik Kepemilikan Tanah di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (Studi tentang Masyarakat Pertanian di Desa Lubuk Mandarsah dengan PT Wira Karya Sakti),” *J. Kaji. Agrar. dan Kedaulatan Pangan*, vol. 1, no. 2, pp. 37–42, 2022, doi: 10.32734/jkakp.v1i2.10077.
- [2] E. Kasuma, Hairunnisa, and Nurliyah, “Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan Pada Program Halte Sampah Di Kelurahan Gunung Bahagia,” *eJournal Ilmu Komun.*, vol. 10, no. 2, pp. 41-51, 2022.
- [3] A. J. Soekandar and P. Pratiwi, “Difusi Inovasi untuk Keberlanjutan Bisnis Ritel Kecil: Strategi Pemasaran Digital,” *J. Ilm. Manajemen, Ekon. dan Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 81–99, 2023, doi: 10.51903/jimeb.v2i1.596.
- [4] Zaitul, D. Ilona, N. Novianti, and F. A. Widiningsih, “Difusi inovasi sistem informasi dan kinerja proses internal pemerintahan desa destinasi wisata: kebermanfaatan teknologi sebagai variabel moderasi,” *Proseding Semin. Nas. LICOBITECH di Politek. LP3I Jakarta, Sabtu 17 Sept. 2022*, no. 1, p. 2022, 2022, [Online]. Available: <https://prosiding.lp3ijkt.ac.id/index.php/licobitech/article/download/5/1>
- [5] B. Pujiyono, A. A. A. Ushud, S. Samsinar, and R. Rusdiyanta, “Peningkatan Pelayanan Publik Desa Wanagiri Melalui SADEWA,” *KRESNA Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 1, pp. 131–140, 2024, doi: 10.36080/kresna.v4i1.125.
- [6] M. R. Ratnani and N. Al Aksar, “Strategi dan Tantangan Transformasi Digital UMKM di Masa Krisis Strategies and Challenges of Digital Transformation of MSMEs in Times of Crisis,” *KRESNA Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 1, pp. 32–42, 2025, doi: <https://doi.org/10.36080/kresna.v5i1.206>.
- [7] J. Chadir, M. Sultan, and A. Murad, “Pengembangan Dashboard Grafis untuk Monitoring Hasil Pemilu sebagai Upaya Peningkatan Transparansi di KJRI Dubai UAE,” *KRESNA Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 1, pp. 84–93, 2025, doi: <https://doi.org/10.36080/kresna.v5i1.162>.
- [8] N. Noviyanti, *et al.*, “Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa Melalui Pelatihan Perubahan Mindset BUMDesa di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun,” *KRESNA Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 2, pp. 275–282, 2024, doi: 10.36080/kresna.v4i2.171.
- [9] R. Kusumawardani, T. Sri Susilowati, I. Nugraha Abdullah, and M. Syafrullah, “Edukasi dan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Lingkungan Eco Enzym di RW 10 Meruya Utara,” *KRESNA Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 2, no. 2, pp. 281–287, 2022, doi: 10.36080/jk.v2i2.36.



- [10] W. Wulandari, *et al.*, “Strategi Memaksimalkan Hasil Penjualan dengan Pemanfaatan Media Sosial Instagram untuk Karang Taruna Kelurahan Paninggilan Ciledug,” *KRESNA Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 3, no. 1, pp. 110–117, 2023, doi: 10.36080/kresna.v3i1.67.
- [11] N. Juliasari, S. Mulyati, and S. Amini, “Pelatihan Wirausaha Menggunakan Tokopedia Bagi Ibu-Ibu Rumah Tangga Bekerjasama dengan Rumah Keluarga Indonesia Kecamatan Karang Tengah-Kota Tangerang,” *KRESNA Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 1, pp. 70–76, 2021, doi: 10.36080/jk.v1i1.10.
- [12] A. N. Rachman, *et al.*, “Strategi Difusi Inovasi Teknologi dan Kesehatan Dalam Peningkatan Kesadaran Kesehatan Masyarakat di Purbaratu,” *DST: Dediaksi Sains dan Teknologi*, vol. 4, no. 2, pp. 213–221, 2024, doi: 10.47709/dst.v4i2.4954.
- [13] I. Ibrahim, *et al.*, “Analisis Adopsi Inovasi Teknologi Informasi Menggunakan Innovation Diffusion Theory (IDT) Pada Aplikasi TaniHub di Wilayah Surabaya,” *J. Inf. Syst. Artif. Intell.*, vol. 4, no. 1, pp. 1-7, 2023, doi: 10.26486/jisai.v4i1.93.
- [14] G. F. Akbar, S. Andarini, and I. R. Kusumasari, “Penggunaan Diffusion of Innovation Theory untuk Pengembangan Bisnis dengan Memanfaatkan Platform Media Sosial Instagram: O’Kimbab,” *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, vol. 2, no. 3, pp. 1-9, 2025, doi: 10.47134/jpem.v2i3.736.
- [15] J. W. Creswell and C. N. Poth, *Qualitative Inquiry & Research Design*, 4th ed. California: SAGE Publications, Inc., 2018. [Online]. Available: <https://uk.sagepub.com/en-gb/qualitative-inquiry-and-research-design/book266033>
- [16] W. V. Nurfajriani, M. W. Ilhami, A. Mahendra, R. A. Sirodj, and M. W. Afgani, “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif,” *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 10, no. 17, pp. 826–833, 2024, doi: 10.5281/zenodo.13929272.
- [17] R. Zulfirman, “Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan,” *J. Penelitian, Pendidik. dan Pengajaran JPPP*, vol. 3, no. 2, pp. 147–153, 2022, doi: 10.30596/jppp.v3i2.11758.
- [18] I. Pranawukir, “Perencanaan Dan Strategi Komunikasi Dalam Meningkatkan Adaptifitas Sumberdaya Manusia Dan Keunggulan Kompetitif Lembaga,” *J. Pustaka Komun.*, vol. 4, no. 2, pp. 247–259, 2021, doi: 10.32509/pustakom.v4i2.1635.
- [19] R. P. Sari, R. B. Saragih, and Yuliati, “Strategi Komunikasi Dalam Implementasi Pendidikan Karakter,” *J. Kaganga J. Ilm. Sos. dan Hum.*, vol. 5, no. 1, pp. 79–87, 2021, doi: 10.33369/jkaganga.5.1.79-87.
- [20] W. P. Sari and A. Soegiarto, “Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar,” *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 9, no. 2, pp. 188–205, 2021, doi: 10.21009/COMMUNICOLOGY.022.03.
- [21] D. Kartikawati, “Implementasi Strategi Komunikasi Pemasaran Produk Cawang AC Pro PT Gobel Dharma Nusantara di Masa Pandemi Korona,” *LUGAS J. Komun.*, vol. 5, no. 2, pp. 115–124, 2021, doi: 10.31334/lugas.v5i2.1836.
- [22] Y. Setyaadi Ade Putra, “Strategi Dan Implementasi Komunikasi Pemerintah Surakarta Dalam Edukasi Pencegahan Stunting (Studi Kasus Program “Sultanikah Capingan”),” *Perilaku dan Promosi Kesehat. Indones. J. Heal. Promot. Behav.*, vol. 6, no. 1, pp. 33–52, 2024, doi: 10.47034/ppk.v6i1.1081.
- [23] I. Irham and T. Tasrif, “Strategi Komunikasi Pengembangan Pariwisata di Kelurahan Matakando Kota Bima,” *J. Lensa Mutiara Komun.*, vol. 6, no. 2, pp. 276–282, 2022, doi: 10.51544/jlmk.v6i2.3572.
- [24] S. Pramucitra, E. Dwi, S. Watie, and F. Fanani, “Evaluasi Strategi Komunikasi Humas Kota Semarang dalam Program Semarang Wegah Nyampah,” *J. Audience*, vol. 5, no. 2, pp. 184–195, 2022, doi: 10.33633/ja.v5i2.6343.
- [25] A. Wahyu Triono, “Evaluasi Strategi Komunikasi dalam Pelaksanaan Program CSR,” *J. Commun. Manag. Organ. Desember*, vol. 2, no. 2, pp. 78–87, 2023.
- [26] P. E. WIBOWO, “Evaluasi Strategi Komunikasi Kementerian Desa-Pdtt Dalam Membangun Awareness Program Inovasi Desa Tahun 2018-2019 (Studi Kasus Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat),” *J. Visi Komun.*, vol. 20, no. 02, p. 187, 2022, doi:



10.22441/visikom.v20i02.14433.

- [27] A. L. Fandita and R. Darmastuti, “Strategi komunikasi dinas komunikasi dan informatika kota Salatiga dalam mensosialisasikan program ‘Matur Mas Yuli,’” *J. Komun. Univ. Garut Has. Pemikir. dan Penelit.*, vol. 9, no. 2, pp. 161–178, 2023, doi: 10.52434/jk.v9i2.2198.
- [28] R. R. Putri and A. B. Burhan, “Evaluasi Komunikasi Strategis pada Organisasi Non-Profit (Studi Kasus: Program Keluarga Berencana Kontrasepsi Vasektomi pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional),” *J. Publ.*, vol. 80, no. 1, pp. 80–99, 2023.
- [29] A. D. Wicakso and N. F. Urfan, “Evaluasi Strategi Komunikasi Pemasaran pada Program Java Ballon Attraction 2022 oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo,” *J. Indones. Manaj. Inform. dan Komun.*, vol. 5, no. 3, pp. 2201–2215, 2024, doi: 10.35870/jimik.v5i3.857.
- [30] D. Agustriani, “Evaluasi Strategi Dalam Manajemen Pengendalian Mutu Pembelajaran Program Studi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri,” *JoIEM (Journal Islam. Educ. Manag.)*, vol. 4, no. 1, pp. 1–23, 2023, doi: 10.30762/joiem.v4i1.914.
- [31] A. Salomo and D. Kartikawangi, M.Si., “Evaluasi Pelaksanaan Strategi Komunikasi dalam Melestarikan Ondel-onde di Jakarta,” *J. Komun. Glob.*, vol. 11, no. 2, pp. 248–273, 2022, doi: 10.24815/jkg.v11i2.26539.